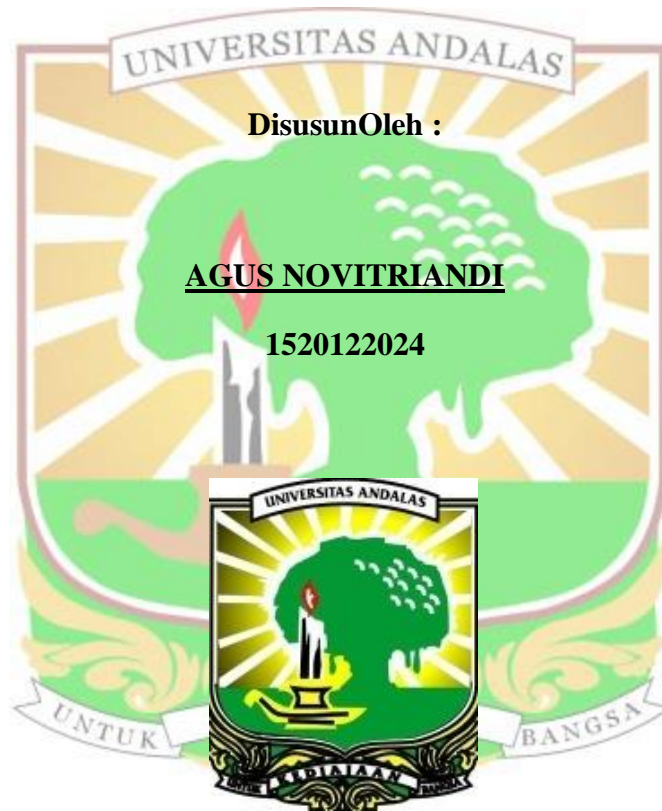


TESIS

**PENGAWASAN TERHADAP PROTOKOL PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) YANG MENINGGAL DI KOTA PADANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Meraih Gelar Magister Kenotariatan



Disusun Oleh :

AGUS NOVITRIANDI

1520122024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

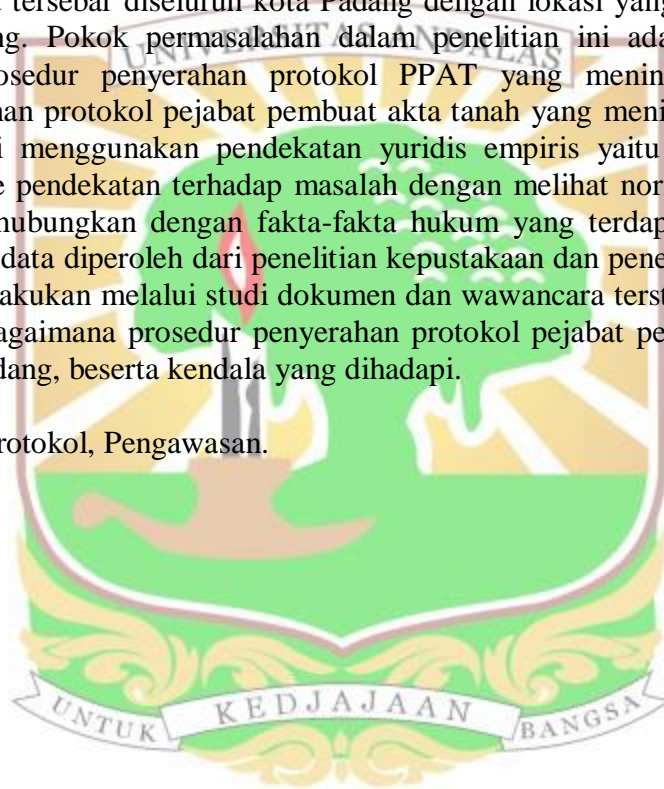
PENGAWASAN TERHADAP PROTOKOL PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG MENINGGAL DI KOTA PADANG

(Agus Novitriandi,SH, 1520122024, Program Magister
KenotariatanFakultasHukumUniversitasAndalas, 89Halaman, Padang 2019)

ABSTRAK

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berperan penting dalam membantu kepala kantor pertanahan kabupaten maupun kota untuk melaksanakan kegiatan dalam proses pendaftaran tanah. Ketentuan yang mengatur mengenai pejabat pembuat akta tanah (PPAT)terdapat dalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor pertanahan kota Padang, jumlah PPAT di kota Padang adalah 122 orang. PPAT tersebut tersebar diseluruh kota Padang dengan lokasi yang paling banyak berada didaerah Kota Padang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1)bagaimanakah pelaksanaan dan prosedur penyerahan protokol PPAT yang meninggal? 2)bagaimanakah pengawasan penyerahan protokol pejabat pembuat akta tanah yang meninggal di kota Padang?. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana prosedur penyerahan protokol pejabat pembuat akta tanah yang meninggal di kota Padang, beserta kendala yang dihadapi.

Kata Kunci :PPAT, Protokol, Pengawasan.



SUPERVISION OF LAND ASSOCIATION (PPAT) PROTOCOL IN DIRECTION IN PADANG CITY

(AgusNovitriandi, S.H,1520122024, Master Degree Program of Notaries Magister, Law Faculty of Andalas University, page 89, 2019)

ABSTRACT

Land Deed Maker Officials was instrumental in helping the head of the district and city land offices to carry out activities in the land registration process. Provisions governing land deed-making officials (PPAT) are contained in article 7 of government regulation number 24 of 1997 concerning land registration. Based on the data the author obtained from the Padang city land office, the number of PPATs in Padang city was 122 people. The PPAT is spread throughout the city of Padang with the most locations located in the city of Padang. The main problems in this study are: 1) how is the implementation and procedure of submitting the PPAT protocol that died? 2) what is the supervision of the submission of the protocol of the land deed maker who died in the city of Padang? This legal research uses an empirical juridical approach, namely a study that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then associated with legal facts contained in the field. In this study data sources were obtained from library research and field research. Data collection techniques are carried out through document studies and structured interviews. The results of the study will show how the procedure for submitting protocols for land deed-making officials who died in the city of Padang, along with the obstacles faced.

Keyword : Land Deed Maker Officials, Protocol, Supervision

